

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendidikan merupakan sarana strategis untuk meningkatkan kualitas suatu bangsa, karenanya kemajuan suatu bangsa dapat diukur dari kemajuan pendidikannya. Pendidikan juga dapat menjadi salah satu sarana yang efektif untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber daya manusia melalui proses pembelajaran.

Melalui pendidikan diharapkan mampu mendukung pembangunan di masa yang akan datang. Khususnya menghasilkan peserta didik berkualitas, yaitu manusia yang mampu menghadapi dan memecahkan masalah kehidupan yang dihadapinya.

Menurut Kunandar (2011) salah satu faktor yang menentukan mutu dalam pendidikan adalah guru. Guru berada pada posisi terdepan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia karena gurulah yang berhadapan langsung dengan peserta didik dalam proses belajar mengajar. Berkat keahliannya sebagai guru, maka akan dilahirkan peserta didik yang berkualitas baik secara akademik, keahlian, kematangan emosional, moral dan spiritual. Sehingga mampu menghasilkan sumber daya manusia yang mampu menghadapi tantangan zaman.

Telah banyak dilakukan penelitian dan ditemukan bahwa guru merupakan faktor inti dalam meningkatkan kualitas pendidikan, maka kualitas profesi guru menjadi suatu keniscayaan. Seorang guru yang profesional memiliki seperangkat kompetensi yang menjadi syarat untuk menopang tugas dan fungsinya sebagai

guru. Guru yang profesional tidak hanya sekedar menguasai bidang ilmu, bahan ajar dan metode, tetapi juga harus mampu memotivasi peserta didik, memiliki kecakapan yang tinggi dan berwawasan luas (Suryadi, 2014).

Berdasarkan Undang-Undang Guru dan Dosen No. 14 tahun 2005 Pasal 2, seorang guru dikatakan sebagai tenaga profesional yang mengandung arti bahwa pekerjaan guru hanya dapat dilakukan oleh seseorang yang mempunyai kualifikasi akademik, kompetensi dan sertifikasi pendidik sesuai dengan persyaratan untuk setiap jenis dan jenjang pendidikan tertentu.

Pemerintah juga telah menetapkan tentang kompetensi yang harus dimiliki oleh guru dalam Undang - Undang No. 14 Tahun 2005 pasal 10 ayat 1 tentang guru dan dosen menyatakan bahwa: Kompetensi guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi: kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Adapun keempat standar kompetensi tersebut wajib dimiliki oleh seorang guru.

Terkait dengan kompetensi guru, hasil penelitian Suparwoto (2011) menunjukkan bahwa aspek kompetensi yang dimiliki oleh guru-guru cenderung beragam. Misalnya saja untuk kompetensi kepribadian yang dimiliki guru secara berurutan guru IPA SMP dan SD tergolong dalam kategori amat baik dan baik, sedangkan untuk guru IPA SMA dengan kategori cukup (22%), untuk kompetensi sosial yang dimiliki guru IPA dengan urutan guru IPA SMP dan SD dalam kategori baik dan guru SMA dengan kategori baik (63%).

Hasil penelitian Rahman (2013) menyatakan bahwa secara rata-rata guru IPA SMP di Kota Ternate berada pada kategori sedang (49,18%), sedangkan

sisanya 34,34 % berada pada kategori baik dan (16,39%) berada pada kategori rendah.

Agar guru profesional maka perlu dilakukan pembinaan baik dengan pendidikan dan pelatihan. Adapun menurut Suyidno dan Yamin (2013) menyatakan bahwa salah satu cara untuk melakukan pembinaan profesionalisme guru yang efektif dan efisien dengan melakukan pemetaan kompetensi guru adalah melalui Uji Kompetensi Guru (UKG). Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 57 Tahun 2012 Pasal 1 menjelaskan bahwa UKG adalah pengujian terhadap penguasaan kompetensi profesional dan pedagogik dalam ranah kognitif sebagai dasar penetapan kegiatan pengembangan keprofesional berkelanjutan dan bagian dari penilaian kinerja guru.

Menurut Yamin dan Maisah (2010) beberapa sumber penilaian tenaga kependidikan adalah: (1) penilaian atas diri sendiri; (2) penilaian oleh siswa; (3) penilaian oleh rekan sejawat; dan (4) penilaian oleh atasan langsung.

Agar fungsi dan tugas yang melekat pada jabatan fungsional guru dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku, maka diperlukan Penilaian Kinerja Guru (PK Guru) yang menjamin terjadinya proses pembelajaran yang berkualitas di semua jenjang pendidikan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 16 Tahun 2009.

Secara umum, Penilaian Kinerja Guru (PK Guru) memiliki fungsi utama, yaitu untuk menilai kemampuan guru dalam menerapkan semua kompetensi dan keterampilan yang diperlukan pada proses pembelajaran, pembimbingan, atau pelaksanaan tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah.

Kompetensi yang dijadikan dasar untuk penilaian kinerja guru adalah kompetensi pedagogik, profesional, sosial dan kepribadian, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007. Keempat kompetensi ini telah dijabarkan menjadi kompetensi guru yang harus dapat ditunjukkan dan diamati dalam berbagai kegiatan, tindakan dan sikap guru dalam melaksanakan pembelajaran atau pembimbingan (Anonim, 2010).

Salah satu propinsi di Indonesia yang masih memiliki kendala dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan adalah Aceh. Jumlah guru yang masih kurang dan penyebaran yang tidak merata menjadi masalah tersendiri dalam pendidikan di Aceh.

Hasil penelitian Majid (2014) menyatakan bahwa mutu pendidikan Aceh berada di atas rangking 25 dari 34 Provinsi di Indonesia. Pembangunan sektor pendidikan belum merata antar kabupaten/kota di Aceh

Selain itu masih kurangnya pelatihan untuk guru menjadi kendala dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Aceh. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Provinsi Aceh, Ramli Rasyid yang mengungkapkan bahwa dari 128.486 guru di Aceh, sebanyak 35 ribu atau 27,4 persen lebih guru sudah mengabdikan selama 17 tahun tapi belum pernah mendapatkan pelatihan. Tahun 2014 sebanyak 27,4 persen guru belum mendapatkan pelatihan dan tahun sebelumnya mencapai 37,4 persen (*Ajeh Journal National Network*, 20 September 2015).

Sedangkan menurut pengamat pendidikan Aceh, Dr. Nazamuddin Basyah, M.A yang juga sebagai Wakil Ketua Majelis Pendidikan Daerah (MPD) dan Pembantu Rektor Bidang Kerja Sama Unsyiah mengungkapkan bahwa

permasalahan lain yang muncul dalam dunia pendidikan Aceh adalah kualitas guru yang masih rendah. Ini terbukti dari hasil uji kompetensi guru (UKG) 2013 bahwa guru di Aceh hanya mendapat nilai 40,66. Artinya, masih berada di bawah rata-rata nasional yang telah mencapai 47,84 (Serambi Indonesia, 22 Mei 2014).

Rendahnya kualitas siswa di Aceh berkorelasi positif dengan kemampuan dan kualitas guru. Hasil Uji Kompetensi Guru (UKG) pada tahun 2013 masih rendah sebagaimana tertera pada tabel berikut ini:

Tabel 1.1. Rata-rata Nilai UKG Per-Kabupaten/ Kota di Aceh tahun 2013

No	Kabupaten/Kota	Nilai
1.	Kab.Simeleu	43.64
2.	Kab. Aceh Singkil	42.02
3.	Kab. Pidie	41.07
4.	Kab.Gayo Lues	40.71
5.	Kota Lhokseumawe	40.53
6.	Kab.Subulussalam	40.46
7.	Kab.Aceh Tamiang	40.41
8.	Kota Banda aceh	39.47
9.	Kota Langsa	39.37
10.	Kota Sabang	39.35
11.	Kab. Aceh Utara	37.59
12.	Kab. Aceh selatan	37.38
13.	Kab. Aceh Tenggara	37.20
14.	Kab. Aceh Timur	37.06
15.	Kab. Aceh Barat	36.96
16.	Kab. Aceh Tengah	36.92
17.	Kab.Aceh Barat Daya	36.86
18.	Kab. Aceh Besar	36.74
19.	Kab. Bireun	36.41
20.	Kab. Kab.Bener meriah	35.89
21.	Kab. Aceh Nagan Raya	35.57
22.	Kab. Pidie Jaya	34.96
23.	Kab. Aceh Jaya	30.00

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Aceh

Rendahnya mutu guru menurut Sudarminta dalam Ismanto (2007) antara lain tampak dari gejala-gejala berikut : (1) lemahnya penguasaan bahan yang diajarkan; (2) ketidak sesuaian antara bidang studi yang dipelajari guru dan yang

dalam kenyataan lapangan yang diajarkan; (3) kurang efektifnya cara pengajaran; (4) kurangnya wibawa guru di hadapan murid; (5) lemahnya motivasi dan dedikasi untuk menjadi pendidik yang sungguh-sungguh; semakin banyak yang kebetulan menjadi guru dan tidak betul-betul menjadi guru; (6) kurangnya kematangan emosional, kemandirian berpikir, dan keteguhan sikap dalam cukup banyak guru sehingga dari kepribadian mereka sebenarnya tidak siap sebagai pendidik; kebanyakan guru dalam hubungan dengan murid masih hanya berfungsi sebagai pengajar dan belum sebagai pendidik; (7) relatif rendahnya tingkat intelektual para mahasiswa calon guru yang masuk LPTK (Lembaga Pengadaan Tenaga Kependidikan) dibandingkan dengan yang masuk Universitas.

Rendahnya mutu guru tentu saja berdampak terhadap pendidikan suatu daerah. Kompetensi guru menjadi hal yang urgen dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Jika guru memiliki kompetensi yang rendah tentu saja akan berdampak pada kualitas pendidikan siswa. Dan pada akhirnya akan berdampak pada sumber daya manusia suatu daerah.

Guru yang berkompoten dituntut untuk menguasai Standar Kompetensi Lulusan (SKL) yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 23 Tahun 2006 yang menyebutkan bahwa untuk meningkatkan kompetensi lulusan maka pemerintah menetapkan Standar Kompetensi Lulusan (SKL).

Standar kompetensi lulusan merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan standar nasional yang telah disepakati, sebagaimana yang ditetapkan dalam. Seorang guru seharusnya mampu menguasai seluruh SKL pada masing-masing mata pelajaran

yang diampunya. Ujian Nasional (UN) merupakan evaluasi dari gabungan beberapa kompetensi yang telah diajarkan di kelas X, XI dan XII. Oleh karena itu penguasaan terhadap seluruh SKL tersebut sangat diharapkan mampu dikuasai oleh setiap guru.

Penelitian yang dilakukan oleh Rasto (2011) menunjukkan bahwa pada mata pelajaran Biologi di Kabupaten Garut untuk kemampuan proses kognitif yang paling rendah adalah mengidentifikasi dan menjelaskan, sedangkan materi pokok yang paling rendah pencapaian SKL-nya (rata-rata di atas 20 SKL) adalah mengenai sel, jaringan dan organ, klasifikasi dan keanekaragaman hayati, fisiologi hewan/ tumbuhan, fisiologi manusia dan genetika. Untuk Kabupaten Tasikmalaya kemampuan proses kognitif yang paling rendah adalah mengidentifikasi dan menjelaskan, sedangkan materi pokok yang paling rendah pencapaian SKL-nya adalah mengenai fisiologi manusia dan genetika.

Berdasarkan fenomena di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang analisis kompetensi guru mata pelajaran Biologi. Khususnya kemampuan profesional guru dalam penguasaan SKL (Standart Kompetensi Lulusan) karena guru merupakan salah satu faktor yang berperan dalam keberhasilan siswa untuk menuntaskan seluruh SKL yang terdapat pada mata pelajaran biologi.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, maka dapat diidentifikasi masalah-masalah berkenaan dengan penelitian ini, yakni :

1. Kualitas guru di Aceh masih rendah terlihat dari rata-rata nilai UKG yang diperoleh

2. Hasil UKG yang telah dilaksanakan hanya meliputi kompetensi professional dan pedagogik, sehingga belum menggambarkan penilaian kompetensi secara utuh
3. Guru masih belum mendapatkan pendidikan dan pelatihan menyebabkan penguasaan materi pelajaran masih kurang.
4. Guru kurang menguasai bahan yang diajarkan. Terdapat beberapa SKL pada mata pelajaran biologi yang masih sulit di kuasai oleh guru sehingga perlu pemetaan terhadap SKL tersebut

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dipaparkan diatas, maka yang menjadi batasan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini dibatasi untuk menentukan kompetensi guru biologi di Aceh Tamiang yang meliputi kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian dan sosial
2. Penelitian ini dilakukan pada guru-guru biologi SMA di Kabupaten Aceh Tamiang untuk kemampuan profesional dengan mengidentifikasi pencapaian SKL Biologi.
3. Penelitian ini dibatasi hanya untuk memetakan SKL Biologi dengan menjawab soal- soal Ujian Nasional (UN) Tahun Ajaran 2011 - 2015 oleh guru-guru biologi.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah kompetensi pedagogik guru biologi SMA di Kabupaten Aceh Tamiang?
2. Bagaimanakah kompetensi profesional guru biologi SMA di Kabupaten Aceh Tamiang berdasarkan pencapaian SKL?
3. Bagaimanakah kompetensi kepribadian guru biologi SMA di Kabupaten Aceh Tamiang ?
4. Bagaimanakah kompetensi sosial guru biologi SMA di Kabupaten Aceh Tamiang ?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Kompetensi pedagogik guru biologi SMA di Kabupaten Aceh Tamiang.
2. Kompetensi profesional guru biologi dalam hal ini mengetahui SKL biologi yang sulit dikuasai oleh guru biologi di Kabupaten Aceh Tamiang
3. Kompetensi kepribadian guru biologi SMA di Kabupaten Aceh Tamiang
4. Kompetensi sosial guru biologi SMA di Kabupaten Aceh Tamiang

1.6 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara praktis dan teoritis. Secara teoritis penelitian ini bermanfaat sebagai bahan acuan bagi peneliti berikutnya yang ingin mengkaji secara lebih mendalam, baik secara

langsung atau tidak langsung terkait hal yang berhubungan dengan kompetensi guru, khususnya guru bidang studi biologi. Manfaat lain dari penelitian ini adalah khasanah menambah ilmu pengetahuan yang berguna untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Aceh Tamiang khususnya.

Adapun manfaat praktisnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan acuan bagi Dinas Pendidikan Aceh Tamiang guna meningkatkan mutu pendidikan di SMA yang terkait dengan kompetensi guru bidang studi Biologi.

Selanjutnya penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam rangka mengembangkan kompetensi guru bidang studi biologi SMA di Kabupaten Aceh Tamiang dan sebagai masukan bagi guru bidang studi biologi untuk mengembangkan kompetensinya.

